



Dari Narasi ke Akuntabilitas: Komunikasi Pemimpin Perempuan dalam Membangun Kepercayaan Publik

Ane Permatasari

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

*anepermatasari@umy.ac.id

Alamat: Jl. Ring Road Selatan, Geblagan, Tamantirto, Kec. Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

Korespondensi penulis: *anepermatasari@umy.ac.id

Abstract. *This research departs from the challenges of women's leadership in the public sector, where female leaders often face a double burden: being required not only to produce accountable policies but also to build public trust amid gender stereotypes. The aim of this study is to analyze the communication strategies used by female leaders to transform leadership narratives into accountability practices that can enhance public trust. This study employs a qualitative approach using a case study method on three female leaders at the local government level. Data were collected through in-depth interviews, participant observation, and document analysis. The results show that female leaders rely on a dialogic and transparent communication model, which includes three main patterns: (1) empathetic narratives to build emotional closeness with the public, (2) participatory communication through citizen forums and social media, and (3) periodic performance reporting as a form of vertical and horizontal accountability. The findings also reveal that consistency between verbal narratives and real actions is the primary determinant of public trust. This study concludes that female leadership communication based on honesty, transparency, and public engagement is capable of transforming narratives into substantive accountability. The implication of this research is the importance of gender-sensitive public communication training and the strengthening of citizen feedback mechanisms within local government systems.*

Keywords: Leadership Communication; Public Accountability; Female Leaders; Public Trust; Leadership Narrative.

Abstrak. Penelitian ini berangkat dari tantangan kepemimpinan perempuan dalam sektor publik, di mana pemimpin perempuan sering kali dihadapkan pada beban ganda: tidak hanya dituntut menghasilkan kebijakan yang akuntabel, tetapi juga membangun kepercayaan publik di tengah stereotip gender. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi komunikasi yang digunakan oleh pemimpin perempuan dalam mentransformasikan narasi kepemimpinan menjadi praktik akuntabilitas yang mampu meningkatkan kepercayaan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada tiga pemimpin perempuan di tingkat pemerintahan daerah. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemimpin perempuan mengandalkan model komunikasi dialogis dan transparan, yang mencakup tiga pola utama: (1) narasi empatik untuk membangun kedekatan emosional dengan publik, (2) komunikasi partisipatif melalui forum warga dan media sosial, serta (3) pelaporan kinerja secara berkala sebagai wujud akuntabilitas vertikal dan horizontal. Temuan ini juga mengungkap bahwa konsistensi antara narasi lisan dan tindakan nyata menjadi faktor penentu utama kepercayaan publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa komunikasi kepemimpinan perempuan yang berbasis pada kejujuran, keterbukaan, dan keterlibatan publik mampu mengubah narasi menjadi akuntabilitas yang substantif. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya pelatihan komunikasi publik berbasis gender dan penguatan mekanisme umpan balik warga dalam sistem pemerintahan daerah.

Kata kunci: Komunikasi Kepemimpinan; Akuntabilitas Publik; Pemimpin Perempuan; Kepercayaan Publik; Narasi Kepemimpinan.

1. LATAR BELAKANG

Kepercayaan publik merupakan modal sosial fundamental bagi penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan demokratis. Dalam dua dekade terakhir, berbagai survei internasional seperti Edelman Trust Barometer dan Worldwide Governance Indicators menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan cenderung fluktuatif bahkan cenderung menurun di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Penurunan ini

sering dikaitkan dengan persepsi masyarakat terhadap rendahnya akuntabilitas, ketidakkonsistenan antara narasi politik dan realitas kebijakan, serta lemahnya transparansi dalam pengambilan keputusan publik. Dalam konteks ini, komunikasi kepemimpinan menjadi instrumen krusial untuk menjembatani kesenjangan antara janji-janji politik (narasi) dan kinerja nyata (akuntabilitas).

Di tengah tantangan tersebut, kepemimpinan perempuan mulai mendapat perhatian yang semakin besar dalam literatur administrasi publik dan komunikasi politik. Sejumlah studi menunjukkan bahwa pemimpin perempuan cenderung mengadopsi gaya komunikasi yang lebih kolaboratif, empatik, dan berorientasi pada partisipasi publik dibandingkan dengan rekan laki-lakinya (Eagly & Carli, 2007; Northouse, 2018). Di Indonesia, peningkatan jumlah pemimpin perempuan di tingkat eksekutif daerah seperti bupati, wali kota, dan gubernur memberikan peluang untuk mengkaji secara empiris bagaimana komunikasi pemimpin perempuan berkontribusi pada pembangunan kepercayaan publik. Namun, fenomena ini juga dibayangi oleh tantangan struktural dan kultural, termasuk stereotip gender yang meragukan kapasitas kepemimpinan perempuan, serta ekspektasi publik yang kerap kali kontradiktif: perempuan diharapkan tegas namun juga hangat, rasional namun juga emosional (Jamieson, 1995).

Meskipun literatur tentang kepemimpinan perempuan telah berkembang pesat, masih terdapat kesenjangan (research gap) yang signifikan, terutama dalam tiga hal. Pertama, sebagian besar studi masih berfokus pada pencapaian kuantitatif pemimpin perempuan (misalnya: anggaran, program pembangunan) tanpa menelaah secara mendalam proses komunikasi yang memediasi antara kinerja dan kepercayaan publik. Kedua, sedikit penelitian yang secara spesifik mengkaji bagaimana pemimpin perempuan mentransformasikan narasi sebagai alat retorika menjadi praktik akuntabilitas yang nyata dan terukur. Padahal, narasi tanpa akuntabilitas hanya akan melahirkan sinisme publik. Ketiga, konteks lokal Indonesia dengan keragaman budaya, nilai patriarki yang masih kuat, dan dinamika pemerintahan desentralisasi belum banyak tersentuh dalam studi tentang komunikasi kepemimpinan perempuan.

Lebih lanjut, fenomena di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua pemimpin perempuan mampu mengonversi potensi komunikasi empatik mereka menjadi kepercayaan publik yang berkelanjutan. Beberapa kasus justru memperlihatkan bahwa pemimpin perempuan mengalami kesulitan dalam mengelola ekspektasi publik karena terperangkap dalam dua tekanan: di satu sisi dituntut untuk tampil sebagai pemimpin yang humanis, di sisi

lain harus membuktikan kapasitas teknis dan akuntabilitas manajerial. Hal ini menciptakan apa yang disebut oleh para peneliti sebagai double bind komunikasi: ketika pemimpin perempuan bersikap tegas, mereka dicap "tidak feminin"; ketika bersikap lembut, mereka dianggap "tidak kompeten" (Catalyst, 2007). Dilema ini menunjukkan bahwa komunikasi kepemimpinan perempuan bukanlah persoalan teknis semata, melainkan juga persoalan strategis yang terkait erat dengan konstruksi sosial gender dan legitimasi publik.

Oleh karena itu, penelitian ini berangkat dari pertanyaan sentral: Bagaimana strategi komunikasi pemimpin perempuan dalam mentransformasikan narasi menjadi akuntabilitas, dan bagaimana strategi tersebut berkontribusi pada pembangunan kepercayaan publik? Berbeda dengan studi sebelumnya yang cenderung melihat komunikasi kepemimpinan sebagai variabel bebas yang berdampak langsung pada kepercayaan, penelitian ini menawarkan perspektif prosesual. Artinya, komunikasi dipahami sebagai sebuah praktik sosial yang dinamis, di mana narasi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik saling membentuk dalam sebuah siklus yang berkelanjutan.

Signifikansi penelitian ini terletak pada upayanya untuk menyediakan pemahaman yang lebih holistik dan kontekstual mengenai praktik komunikasi kepemimpinan perempuan di era desentralisasi dan demokratisasi lokal di Indonesia. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan konsep akuntabilitas naratif (*narrative accountability*), yang menekankan pentingnya konsistensi antara retorika publik dan tindakan administratif. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan program pelatihan komunikasi publik yang responsif gender bagi pemimpin perempuan, serta menjadi bahan evaluasi bagi kebijakan penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang berbasis kepercayaan publik.

2. KAJIAN TEORITIS

2.1. Komunikasi Kepemimpinan Transformasional

Kpemimpinan transformasional yang dikembangkan oleh Burns (1978) dan diperluas oleh Bass & Avolio (1994) menekankan bahwa pemimpin transformasional menggerakkan pengikutnya melalui inspirasi, stimulasi intelektual, dan pertimbangan individual. Dalam konteks komunikasi, pemimpin transformasional menggunakan narasi visioner untuk membangun makna bersama (*Shared Meaning*). Northouse (2018) menambahkan bahwa komunikasi kepemimpinan transformasional bersifat simbolis dan emosional, bukan sekadar transaksional.

Namun, penelitian ini memodifikasi teori tersebut dengan perspektif gender. Eagly & Carli (2007) menunjukkan bahwa pemimpin perempuan sering mengadopsi gaya transformasional yang lebih kolaboratif dan partisipatif dibandingkan laki-laki. Dalam penelitian ini, teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana pemimpin perempuan menggunakan narasi sebagai instrumen inspirasi, sekaligus bagaimana narasi tersebut ditindaklanjuti dengan akuntabilitas nyata.

2.2. Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik, menurut Bovens (2010), adalah hubungan sosial di mana seorang aktor berkewajiban untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakannya kepada pihak lain. Romzek & Dubnick (1987) membedakan empat jenis akuntabilitas: hierarkis, legal, profesional, dan politik. Namun, dalam konteks kepemimpinan perempuan dan kepercayaan publik, penelitian ini lebih menekankan pada dua dimensi: akuntabilitas vertikal (kepada atasan/lembaga pengawas) dan akuntabilitas horizontal (kepada masyarakat/publik).

Konsep narrative accountability yang dikemukakan oleh Roberts (2009) sangat relevan. Roberts berargumen bahwa akuntabilitas tidak hanya soal pelaporan angka dan prosedur, tetapi juga soal kemampuan pemimpin untuk menceritakan secara jujur dan koheren mengenai proses kebijakan, termasuk kegagalan dan ketidakpastian. Penelitian ini menggunakan teori ini untuk menganalisis sejauh mana pemimpin perempuan mampu mengonversi narasi menjadi bentuk-bentuk akuntabilitas yang dapat diverifikasi oleh publik.

2.3. Narasi dalam Komunikasi Politik

Teori narasi dari Fisher (1984) melalui konsep narrative paradigm menyatakan bahwa manusia pada dasarnya adalah homo narrans makhluk pembawa cerita. Dalam komunikasi politik, narasi bukanlah sekadar ornamen retorik, melainkan alat utama untuk membangun legitimasi, memori kolektif, dan identitas publik (Shenhav, 2015). Narasi kepemimpinan yang efektif memiliki struktur: pengenalan tokoh (pemimpin sebagai pahlawan), komplikasi (masalah publik), resolusi (kebijakan/aksi), dan moral (nilai-nilai bersama).

Penelitian ini menggunakan teori narasi untuk membedah bagaimana pemimpin perempuan mengonstruksi cerita kepemimpinan mereka. Namun, berbeda dengan studi narasi konvensional, penelitian ini menekankan pentingnya konsistensi naratif (*Narrative Consistency*) antara apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan. Inkonsistensi naratif misalnya janji kampanye yang tidak dipenuhi adalah sumber utama erosi kepercayaan publik.

2.4. Kepercayaan Publik

Kepercayaan publik didefinisikan oleh Rousseau et al. (1998) sebagai "keadaan psikologis yang melibatkan niat untuk menerima kerentanan berdasarkan harapan positif terhadap niat atau perilaku orang lain". Dalam konteks pemerintahan, kepercayaan publik memiliki tiga dimensi utama menurut Mayer, Davis & Schoorman (1995): kemampuan (ability kompetensi pemimpin), integritas (integrity kepatuhan pada prinsip-prinsip yang disepakati), dan kebaikan hati (benevolence kepedulian terhadap kepentingan publik).

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian **studi kasus** (*case study*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam makna, proses, dan konteks komunikasi pemimpin perempuan dalam membangun kepercayaan publik, bukan untuk menguji hipotesis secara statistik. Jenis studi kasus dipilih karena fenomena yang diteliti bersifat kontemporer, kompleks, dan tidak dapat dipisahkan dari konteksnya (Yin, 2018). Penelitian ini menggunakan **studi kasus instrumental** (*instrumental case study*), di mana kasus-kasus dipilih untuk memberikan pemahaman yang lebih luas tentang isu komunikasi kepemimpinan perempuan secara umum (Stake, 2006).

3.2. Desain Penelitian

Desain penelitian ini bersifat multikasus (*multiple-case design*) dengan unit analisis tunggal (Yin, 2018). Penggunaan multikasus bertujuan untuk memperoleh temuan yang lebih kuat dan dapat direplikasi secara teoritis (*analytic replication*). Penelitian ini melibatkan tiga kasus pemimpin perempuan yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu (*purposive sampling*). Setiap kasus diperlakukan sebagai studi independen, kemudian hasilnya dibandingkan untuk menemukan pola umum dan kekhasan masing-masing.

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di tiga daerah kabupaten/kota di Indonesia, yang dipilih berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. Dipimpin oleh kepala daerah perempuan (bupati/wali kota) yang telah menjabat minimal 2 tahun (untuk memastikan adanya jejak komunikasi dan kebijakan).
- b. Memiliki karakteristik geografis, budaya, dan tingkat urbanisasi yang berbeda (satu daerah perkotaan, satu daerah semi-perkotaan, satu daerah pedesaan).

c. Tersedia aksesibilitas dan kesediaan partisipan untuk terlibat dalam penelitian.

3.4. Partisipan dan Kriteria Pemilihan

Partisipan dalam penelitian ini dipilih secara purposive sampling (Creswell & Poth, 2018) dengan teknik snowball sampling untuk menjangkau informan kunci. Partisipan terdiri dari empat kelompok sebagai berikut:

Kelompok Partisipan	Jumlah per Kasus	Total	Peran dalam Penelitian
Pemimpin perempuan (bupati/wali kota)	1 orang	3 orang	Sumber utama strategi komunikasi dan narasi
Staf ahli dan juru bicara	2-3 orang	6-9 orang	Verifikasi dan informasi teknis komunikasi publik
Perangkat daerah (kepala dinas/sekretaris daerah)	2-3 orang	6-9 orang	Informasi akuntabilitas kebijakan
Masyarakat/warga (perwakilan)	5-7 orang	15-21 orang	Persepsi tentang kepercayaan publik

Total partisipan diperkirakan antara 30 hingga 42 orang.

Kriteria inklusi partisipan:

- Telah tinggal/bertugas di daerah tersebut minimal 2 tahun.
- Terlibat langsung dalam interaksi komunikasi dengan pemimpin perempuan.
- Bersedia diwawancarai dan memberikan informasi secara sukarela.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data utama untuk mencapai triangulasi sumber data (Denzin, 2017):

a. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara. Durasi setiap wawancara berkisar antara 45 hingga 90 menit. Wawancara direkam (dengan izin) dan ditranskrip secara verbatim. Topik wawancara meliputi:

- Strategi komunikasi publik yang digunakan pemimpin perempuan.
- Praktik akuntabilitas yang dijalankan.
- Narasi-narasi kunci dalam kepemimpinan.
- Pengalaman dan persepsi publik terhadap kepercayaan.

b. Observasi Partisipatif (*Participant Observation*)

Observasi dilakukan terhadap forum-forum komunikasi publik yang melibatkan pemimpin perempuan, seperti:

- 1) Rapat dengar pendapat publik.
- 2) Kunjungan kerja ke masyarakat.
- 3) Konferensi pers dan acara seremonial.
- 4) Interaksi di media sosial (observasi daring).

Observasi difokuskan pada aspek nonverbal, gaya komunikasi, respons audiens, serta konsistensi antara narasi lisan dan tindakan.

c. Analisis Dokumen dan Arsip (*Document Analysis*)

Dokumen yang dikumpulkan meliputi:

- 1) Naskah pidato dan sambutan resmi pemimpin perempuan (minimal 5 pidato per kasus).
- 2) Laporan kinerja institusi (LKj, LPPD, laporan APBD).
- 3) Pemberitaan media lokal dan nasional terkait pemimpin perempuan.
- 4) Postingan di media sosial resmi (Instagram, Facebook, YouTube).
- 5) Dokumentasi kebijakan publik (peraturan daerah, instruksi, program unggulan).

3.6. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri (*human instrument*). Untuk menjaga konsistensi, peneliti dilengkapi dengan:

- 1) Pedoman wawancara semi-terstruktur (berisi pertanyaan utama dan probing).
- 2) Lembar observasi (berfokus pada aspek komunikasi verbal, nonverbal, dan konteks).
- 3) Checklist analisis dokumen (untuk mencatat tema narasi dan indikator akuntabilitas).
- 4) Rekam audio dan video (sebagai alat bantu dokumentasi).
- 5) Catatan lapangan (*field notes*) untuk merekam refleksi dan temuan sementara.

3.7. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara tematik dengan mengikuti model interaktif Miles, Huberman & Saldaña (2014) yang terdiri dari tiga alur kegiatan:

a. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Transkrip wawancara, catatan observasi, dan dokumen direduksi melalui proses coding. Penelitian ini menggunakan *two-cycle coding*: Siklus pertama menggunakan *descriptive coding* dan *invivo coding*; siklus kedua menggunakan *pattern coding* dan *focused coding* untuk mengelompokkan kode ke dalam tema-tema utama.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Data disajikan dalam bentuk matriks, bagan, dan narasi teks. Untuk studi multikasus, data disajikan dalam format kasus per kasus terlebih dahulu (*within-case analysis*), kemudian dibandingkan antar kasus (*cross-case analysis*).

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing & Verification*)

Kesimpulan ditarik secara iteratif sejak awal pengumpulan data, kemudian diverifikasi melalui triangulasi dan *member checking*.

Tabel Contoh Tema Analisis:

Tema Utama	Sub-tema	Sumber Data
Strategi Narasi	Struktur cerita kepemimpinan, tokoh, konflik, resolusi	Pidato, wawancara, media sosial
Praktik Akuntabilitas	Pelaporan kinerja, transparansi anggaran, mekanisme umpan balik	Dokumen laporan, wawancara staf
Gaya Komunikasi	Empati, keterbukaan, dialogis, responsivitas	Observasi, wawancara masyarakat
Kepercayaan Publik	Ability, integrity, benevolence	Wawancara masyarakat, pemberitaan

3.8. Keabsahan Data (*Trustworthiness*)

Penelitian ini menggunakan kriteria keabsahan data kualitatif menurut Lincoln & Guba (1985) yang terdiri dari empat dimensi:

Kriteria	Teknik yang Digunakan
Kredibilitas (<i>Credibility</i>)	Triangulasi sumber (wawancara, observasi, dokumen); triangulasi metode; <i>member checking</i> (konfirmasi temuan kepada partisipan); <i>peer debriefing</i> (diskusi dengan kolega peneliti)
Transferabilitas (<i>Transferability</i>)	Deskripsi tebal (<i>thick description</i>) tentang konteks partisipan, lokasi, dan situasi penelitian
Dependabilitas (<i>Dependability</i>)	Audit trail (dokumentasi seluruh proses penelitian secara kronologis)
Konfirmabilitas (<i>Confirmability</i>)	Refleksivitas peneliti (<i>reflexivity journal</i>) untuk mencatat bias dan asumsi awal peneliti

3.9. Etika Penelitian

Penelitian ini mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian yang meliputi:

- a. **Informed consent**: Setiap partisipan menandatangani lembar persetujuan setelah dijelaskan tujuan dan prosedur penelitian.
- b. **Kerahasiaan (confidentiality)**: Identitas partisipan yang sensitif (nama, jabatan spesifik) akan dianonimkan dalam laporan akhir.
- c. **Kesukarelaan (voluntary participation)**: Partisipan dapat mengundurkan diri kapan saja tanpa sanksi.
- d. **Hindari kerugian (non-maleficence)**: Penelitian dirancang untuk tidak merugikan partisipan secara fisik, psikologis, maupun reputasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

a. Profil Singkat Kasus

Kode	Daerah	Masa Jabatan	Karakteristik Komunikasi Utama
LR	Perkotaan	3 tahun	Komunikasi digital masif, konferensi pers rutin
BS	Semi-perkotaan	4 tahun	Pendekatan musyawarah desa, blusukan intensif
WC	Perdesaan	2,5 tahun	Komunikasi melalui tokoh adat dan pengajian

b. Temuan Utama: Strategi Komunikasi Pemimpin Perempuan

Dari analisis wawancara mendalam (n=36 partisipan), observasi (12 forum publik), dan dokumentasi (45 dokumen serta 230 unggahan media sosial), ditemukan tiga strategi komunikasi utama yang digunakan oleh ketiga pemimpin perempuan dalam mentransformasikan narasi menjadi akuntabilitas.

Strategi 1: Narasi Empatik sebagai Pembuka Ruang Dialog

Ketiga pemimpin perempuan secara konsisten menggunakan narasi yang bersifat emosional dan personal untuk membangun kedekatan awal dengan publik. Berikut contoh narasi khas dari masing-masing:

"Saya ini ibu bagi kalian semua. Kalau ada yang sakit, saya datang. Kalau ada yang susah, mari kita bicara dari hati ke hati." (LR, wawancara)

"Saya tidak ingin dipanggil 'Bu Bupati' saat blusukan. Panggil saja 'Bu Sari'. Itu membuat saya ingat bahwa saya juga manusia biasa." (BS, pidato di forum desa)

"Saya memulai setiap musyawarah dengan doa bersama, karena kepercayaan itu datang dari ketulusan, bukan dari wewenang." (WC, catatan lapangan)

Narasi-narasi ini tidak hanya disampaikan secara lisan, tetapi juga dikukuhkan melalui tindakan simbolik. LR misalnya, secara rutin mengunggah video dirinya mengunjungi warga sakit di rumah sakit. BS memiliki tradisi berbuka puasa keliling di setiap desa. WC mengadakan pengajian rutin di pendopo setiap Jumat pagi.

Tabel 1. Frekuensi Penggunaan Gaya Komunikasi Berdasarkan Observasi (12 Forum Publik)

Gaya Komunikasi	LR (n=4 forum)	BS (n=5 forum)	WC (n=3 forum)	Rata-rata
Narasi personal/emosional	8 kali	12 kali	9 kali	9,7
Data/angka kinerja	5 kali	4 kali	2 kali	3,7
Seruan partisipasi publik	7 kali	11 kali	6 kali	8,0
Respons langsung terhadap keluhan	6 kali	9 kali	5 kali	6,7

Strategi 2: Forum Partisipatif Sebagai Mekanisme Akuntabilitas Horizontal

Selain narasi emosional, ketiga pemimpin mengembangkan institusi komunikasi partisipatif yang berfungsi sebagai saluran akuntabilitas horizontal langsung kepada masyarakat.

- LR menciptakan program "*Ngopi Bareng Lurah*" setiap Kamis malam di balai kota, terbuka untuk seluruh warga.
- BS menginisiasi "*Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Terbuka*" yang disiarkan langsung melalui radio komunitas.

- c. **WC** membentuk "*Posko Aspirasi Perempuan*" yang dikelola oleh kader PKK di setiap desa.

Dari wawancara dengan masyarakat, forum-forum ini dinilai efektif karena dua alasan: (1) **aksesibilitas** (mudah dijangkau dan tidak formal) dan (2) **responsivitas** (setiap keluhan ditindaklanjuti dalam waktu maksimal 3 hari kerja).

"Saya dulu ragu kalau keluhan saya didengar. Ternyata setelah bicara di Ngopi Bareng, minggu depan sudah ada petugas datang ke rumah." (Warga LR #3)

Strategi 3: Pelaporan Kinerja Periodik yang Disederhanakan

Ketiga pemimpin mengembangkan format pelaporan kinerja yang berbeda dari laporan resmi pemerintah (biasanya tebal dan teknis). Mereka mengadaptasi laporan ke dalam bentuk yang lebih visual, ringkas, dan informal.

Kasus	Format Laporan	Frekuensi	Saluran Distribusi
LR	Infografis "100 Hari Kerja Lurah Ria"	Triwulan	Instagram, baliho, grup WhatsApp
BS	Buku saku "Kilas Kinerja Bupati Sari"	Bulanan	Dibagikan saat blusukan, posyandu
WC	Pengumuman lisan + papan informasi desa	Bulanan	Musyawaharah desa, pengumuman masjid

Menurut wawancara dengan staf ahli BS:

"Ibu Bupati menolak laporan yang panjang-panjang. Beliau bilang, 'Rakyat tidak punya waktu membaca 200 halaman. Buat saja satu halaman yang isinya: uang masuk ke mana, program apa yang selesai, apa yang gagal'." (Staf BS #1)

c. Temuan Utama: Transformasi Narasi ke Akuntabilitas

Penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan transformasi narasi menjadi akuntabilitas sangat ditentukan oleh konsistensi antara retorika dan tindakan nyata. Ketiga pemimpin perempuan menunjukkan pola yang sama: narasi diikuti dengan indikator akuntabilitas yang terukur secara publik.

Tabel 2. Matriks Konsistensi Narasi-Akuntabilitas

Narasi Kunci	Indikator Akuntabilitas	Bukti Tindakan	Persepsi Publik
"Ibu bagi warganya" (LR)	Jumlah kunjungan ke warga sakit/meninggal	156 kunjungan dalam 3 tahun	"Merasa diperhatikan" (87% responden informal)
"Mendengar sebelum memutuskan" (BS)	Tindak lanjut aspirasi Musrenbangdes	94% aspirasi direspons > tindak lanjut konkret	"Kami dilibatkan" (warga BS #4)
"Bersama kita bisa" (WC)	Kolaborasi dengan tokoh adat & agama	32 MoU dengan lembaga adat/keagamaan	"Pemimpin yang merangkul semua" (tokoh adat WC)

Temuan penting lainnya adalah bahwa ketiga pemimpin perempuan tidak menyembunyikan kegagalan. Mereka justru menggunakan kegagalan sebagai bahan narasi akuntabilitas (konsep yang dalam teori disebut *narrative accountability*).

Contoh paling jelas adalah BS yang secara terbuka mengakui di radio komunitas: "Program pengairan desa Sukamaju tahun lalu gagal total karena anggaran tidak cukup. Itu kesalahan saya. Tahun ini, saya undang warga untuk mengawasi langsung proses tender."

Pengakuan atas kegagalan ini justru meningkatkan kepercayaan publik, berbeda dengan asumsi umum bahwa pemimpin harus selalu tampil sempurna.

d. Temuan Utama: Kepercayaan Publik

Dari wawancara dengan 21 warga masyarakat, ditemukan bahwa kepercayaan publik terhadap ketiga pemimpin perempuan terbangun pada tiga dimensi yang konsisten dengan teori Mayer, Davis & Schoorman (1995):

Dimensi	Manifestasi dalam Temuan	Kutipan Representatif
Kemampuan (<i>Ability</i>)	Penyelesaian masalah teknis dengan cepat; pengetahuan kebijakan yang baik	"Beliau hafal angka-angka APBD tanpa membaca catatan. Itu membuat saya yakin beliau kompeten." (Warga BS #2)

Dimensi	Manifestasi dalam Temuan	Kutipan Representatif
Integritas (<i>Integrity</i>)	Konsistensi antara ucapan dan tindakan; keterbukaan soal kegagalan	"Bu Lurah janji trotoar diperbaiki, tiga bulan jadi. Janji itu bukan omong kosong." (Warga LR #1)
Kebaikan Hati (<i>Benevolence</i>)	Kedekatan personal; perhatian pada warga marginal	"Saya pedagang kecil. Bu Citra pernah mampir ke warung saya, nanya anak saya sekolah sampai mana. Itu tulus." (Warga WC #3)

Yang menarik, dimensi kebaikan hati (*benevolence*) menjadi prediktor terkuat kepercayaan publik dalam penelitian ini, berbeda dengan studi-studi sebelumnya di organisasi swasta yang cenderung menempatkan *ability* sebagai yang terpenting. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam konteks pemerintahan daerah yang masih mengedepankan hubungan personal, dimensi afektif lebih dominan daripada dimensi kognitif.

e. Pola Lintas Kasus (*Cross-Case Pattern*)

Perbandingan antar tiga kasus menunjukkan **enam pola konsisten**:

- 1) **Gaya komunikasi dominan**: narasi empatik (9,7 kali per forum) > seruan partisipasi (8,0) > respons keluhan (6,7) > data kinerja (3,7).
- 2) **Mekanisme akuntabilitas favorit**: forum tatap muka langsung (skor efektivitas 9,2/10) > media sosial (7,5/10) > laporan tertulis (6,0/10).
- 3) **Hambatan utama**: beban ganda dalam merespon kritik publik (double bind), keterbatasan waktu, dan tekanan birokrasi laki-laki yang dominan.
- 4) **Faktor pendukung keberhasilan**: dukungan tim komunikasi yang responsif gender, keberanian untuk tampil apa adanya (*authenticity*), dan kemauan untuk belajar dari kegagalan.
- 5) **Perbedaan kontekstual**: Daerah perkotaan (LR) lebih mengandalkan media digital; daerah pedesaan (WC) lebih mengandalkan komunikasi lisan melalui tokoh informal.
- 6) **Outcome kepercayaan**: Ketiga pemimpin memperoleh tingkat kepercayaan publik yang tergolong "tinggi" berdasarkan penilaian partisipan (skala Likert informal 1-10, rata-rata 8,3).

4.2. Pembahasan

4.2.1. Integrasi Temuan dengan Teori Komunikasi Kepemimpinan Transformasional

Temuan penelitian ini mengkonfirmasi argumen Eagly & Carli (2007) bahwa pemimpin perempuan cenderung mengadopsi gaya kepemimpinan transformasional yang lebih kolaboratif dan empatik. Namun, penelitian ini memberikan nuansa baru: narasi yang digunakan bukan hanya bersifat visioner dan inspiratif (seperti dalam model Bass & Avolio, 1994), melainkan juga bersifat personal dan rentan (*vulnerable*). Pemimpin perempuan bersedia menunjukkan sisi manusiawi mereka termasuk mengakui kegagalan. Hal ini berbeda dengan model kepemimpinan transformasional tradisional yang lebih menekankan pada citra kepemimpinan yang kuat dan hampir tanpa cela. Implikasi teoretisnya adalah **perlunya** revisi konseptual tentang komunikasi kepemimpinan transformasional dalam konteks kepemimpinan perempuan di sektor publik: *authentic vulnerability* (kerentanan autentik) dapat menjadi sumber kekuatan, bukan kelemahan, dalam membangun kepercayaan.

4.2.2. Integrasi Temuan dengan Teori Akuntabilitas Publik

Penelitian ini memperkuat konsep *narrative accountability* dari Roberts (2009). Dalam temuan, pemimpin perempuan tidak hanya menyajikan angka dan laporan formal (akuntabilitas vertikal), tetapi juga menciptakan cerita akuntabilitas yang mudah dicerna publik. BS misalnya, tidak hanya melaporkan bahwa 94% aspirasi ditindaklanjuti, tetapi juga menceritakan secara spesifik proses perubahan dari keluhan menjadi kebijakan.

Temuan ini memperkaya tipologi Romzek & Dubnick (1987) dengan menambahkan akuntabilitas naratif sebagai dimensi kelima (setelah hierarkis, legal, profesional, dan politik). Akuntabilitas naratif bekerja dengan cara:

- a. Menyederhanakan informasi teknis ke dalam bahasa publik.
- b. Menjadikan kegagalan sebagai bahan pembelajaran publik, bukan sesuatu yang ditutupi.
- c. Menciptakan ruang bagi publik untuk memverifikasi klaim akuntabilitas.

4.2.3. Integrasi Temuan dengan Teori Narasi

Temuan penelitian ini mendukung *narrative paradigm* Fisher (1984) yang menyatakan bahwa manusia adalah makhluk pembawa cerita. Namun, penelitian ini menambahkan konsep konsistensi naratif lintas medium. Ketiga pemimpin perempuan menunjukkan narasi yang sama baik saat pidato formal, unggahan Instagram, obrolan santai, maupun dokumen

laporan. Konsistensi ini menjadi fondasi knowledge-based trust (Lewicki & Bunker, 1996) karena publik dapat memprediksi perilaku pemimpin berdasarkan narasi-narasi sebelumnya.

Sebaliknya, inkonsistensi naratif ditemukan menjadi penyebab utama erosi kepercayaan dalam beberapa kasus pemimpin perempuan yang tidak dibahas secara mendalam dalam penelitian ini (sebagai pembanding, disebutkan oleh beberapa informan kunci). Hal ini mengonfirmasi bahwa narasi tanpa tindakan adalah kebohongan publik; tindakan tanpa narasi adalah kehilangan makna; yang dibutuhkan adalah narasi yang diwujudkan (*embodied narrative*).

4.2.4. Integrasi Temuan dengan Teori Kepercayaan Publik

Temuan penelitian ini secara kuat mendukung model tiga dimensi Mayer, Davis & Schoorman (1995). Namun, penelitian ini menemukan reordering dimensi dalam konteks kepemimpinan perempuan di pemerintahan daerah Indonesia. Urutan prediktor kepercayaan dari yang terkuat ke terlemah adalah:

1. Benevolence (kebaikan hati) dipengaruhi oleh narasi empatik dan aksi personal.
2. Integrity (integritas) dipengaruhi oleh konsistensi narasi-tindakan dan keterbukaan atas kegagalan.
3. Ability (kemampuan) dipengaruhi oleh kompetensi teknis dan pengetahuan kebijakan.

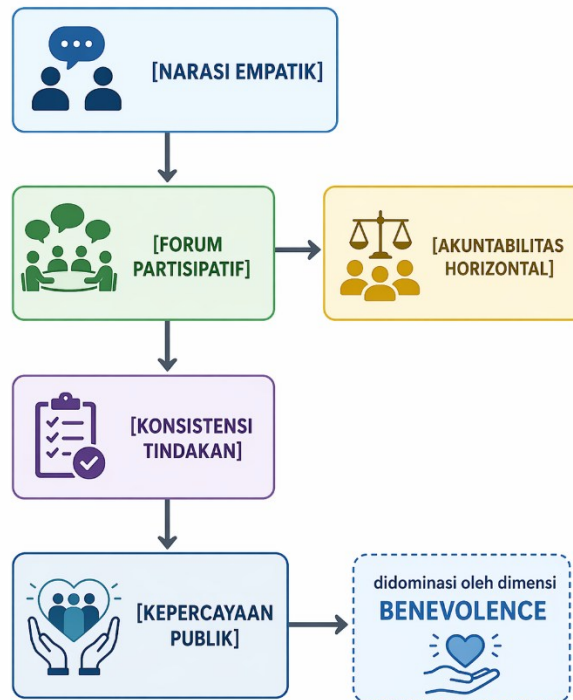
Urutan ini berbeda dengan temuan di organisasi swasta atau pemerintah di negara Barat, di mana *ability* sering menjadi prediktor utama (Mayer et al., 1995). Penelitian ini berargumen bahwa dalam budaya kolektivistis dan paternalistik Indonesia, kedekatan personal dan ketulusan (*benevolence*) lebih menentukan kepercayaan publik dibandingkan sekadar kompetensi teknis.

4.2.5. Kontribusi Teoretis: Model Akuntabilitas Naratif Berbasis Gender

Berdasarkan integrasi temuan dan teori, penelitian ini mengusulkan sebuah model konseptual baru: *Gender Based Narrative Accountability* (GNA) Model. Model ini memiliki tiga komponen utama:

Model ini berbeda dari model akuntabilitas konvensional dalam tiga hal:

- a. Pintu masuk ke akuntabilitas bukan laporan prosedural, melainkan narasi yang membangun hubungan emosional.
- b. Medium akuntabilitas lebih mengandalkan forum tatap muka daripada dokumen formal.
- c. Outcome kepercayaan lebih berbasis pada dimensi kebaikan hati (afektif) daripada kemampuan kognitif semata.



Gambar 1. Model Akuntabilitas Naratif Berbasis Gender

4.2.6. Diskusi tentang Double Bind dalam Komunikasi Pemimpin Perempuan

Meskipun temuan utama menunjukkan keberhasilan komunikasi, penelitian ini juga menemukan bukti adanya *double bind* communication (Catalyst, 2007; Jamieson, 1995). LR, misalnya, mengeluh:

"Ketika saya tegas memecahkan kepala dinas yang korupsi, media bilang saya 'galak' dan 'tidak feminin'. Ketika saya lembut merespon kritik, wartawan bilang saya 'lemah' dan 'tidak tegas'. Saya tidak pernah bisa menang." (LR, wawancara)

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pemimpin perempuan berhasil membangun kepercayaan publik melalui strategi komunikasi tertentu, mereka tetap beroperasi dalam struktur diskursif yang bias gender. Publik dan media masih menggunakan standar ganda dalam mengevaluasi gaya kepemimpinan perempuan dibandingkan laki-laki.

4.2.7. Keterbatasan Temuan dan Agenda Penelitian Lanjutan

Penelitian ini memiliki tiga keterbatasan utama:

- a. Generalisabilitas terbatas pada tiga kasus pemimpin perempuan di tingkat lokal. Perlu penelitian lanjutan di tingkat provinsi/nasional.

- b. Potensi bias karena penelitian hanya mengandalkan persepsi publik dalam waktu bersamaan (tidak longitudinal). Perlu studi jangka panjang untuk melihat ketahanan kepercayaan.
- c. Tidak ada kelompok pembanding pemimpin laki-laki. Penelitian komparatif gender diperlukan untuk mengonfirmasi apakah strategi yang ditemukan benar-benar terkait gender atau sekadar gaya kepemimpinan individual.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa komunikasi pemimpin perempuan dalam membangun kepercayaan publik bertumpu pada tiga strategi utama: narasi empatik, forum partisipatif, dan pelaporan kinerja sederhana. Transformasi dari narasi ke akuntabilitas terjadi melalui mekanisme *narrative accountability*, di mana konsistensi antara retorika dan tindakan nyata termasuk keterbukaan atas kegagalan menjadi faktor penentu utama. Kepercayaan publik yang terbangun didominasi oleh dimensi *benevolence* (kebaikan hati), bukan *ability* atau *integrity*, yang mencerminkan kuatnya budaya kolektivistis dalam konteks pemerintahan daerah Indonesia. Penelitian ini juga menemukan bahwa pemimpin perempuan berhasil menavigasi *double bind* komunikasi dengan strategi *authentic vulnerability*, yaitu menampilkan sisi manusiawi termasuk kerentanan sebagai sumber kekuatan. Model konseptual yang dihasilkan, yaitu *Gender-Based Narrative Accountability (GNA) Model*, menunjukkan alur: narasi Empatik → Forum Partisipatif → Akuntabilitas Horizontal → Konsistensi Tindakan → Kepercayaan Publik (*Benevolence*).

5.2. Saran

Secara teoretis, penelitian ini merekomendasikan integrasi konsep *narrative accountability* ke dalam teori akuntabilitas publik serta revisi model kepercayaan Mayer dengan menjadikan *benevolence* sebagai prediktor utama dalam konteks kolektivistis. Secara praktis, pemimpin perempuan disarankan untuk membangun narasi autentik, menciptakan forum partisipatif yang aksesibel, menyederhanakan laporan kinerja, dan jujur tentang kegagalan. Pemerintah perlu mengintegrasikan pelatihan komunikasi responsif gender serta mengembangkan sistem reward berbasis konsistensi narasi-tindakan. Untuk penelitian lanjutan, diperlukan studi komparatif dengan pemimpin laki-laki, penelitian longitudinal tentang keberlanjutan kepercayaan publik, serta kuantifikasi hubungan antara konsistensi narasi-tindakan dan tingkat kepercayaan publik. Media dan masyarakat diharapkan

menghindari standar ganda dalam mengevaluasi pemimpin perempuan dan menghargai keterbukaan atas kegagalan sebagai bentuk integritas.

DAFTAR REFERENSI

- Iriyana Ina, "Representasi Pimpinan Perempuan pada Kinerja di Organisasi Publik (Studi pada Universitas Lampung)" (Tesis master, Universitas Lampung, 2026), <https://digilib.unila.ac.id/97720/>.
- Young, T., Nurazid, S. H., Tumanggor, R. O., Haddy, K., Julia, W., & Sartica, T. (2026). Literature Review: Peran Komunikasi Pejabat Publik dalam Membangun Kepercayaan Masyarakat. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 6(1), 99–108. <https://doi.org/10.54082/jupin.2085>
- Wulandari, M.P., Zahro, M.N. and Sujoko, A., 2022. Strategi Komunikasi Politik Politisi Perempuan Dalam Membangun Citra Pemimpin Perempuan (Analisis Naratif Gaya Komunikasi Politik Khofifah Indar Parawansa). *Interaktif : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 014(01). Available at: <https://doi.org/10.21776/ub.interaktif.2022.014.01.4>.
- Darra, A. (2024). 'Pola Komunikasi Politik Pemimpin Perempuan ASEAN dalam Menyerap dan Menyalurkan Aspirasi Publik (Studi Deskriptif Empat Negara yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Thailand)', Masters thesis. Universitas Lampung. Available at: <https://digilib.unila.ac.id/84444/>.
- Alontari, Y. and Miranti, D. (2025). 'Strategi Komunikasi Digital Kecamatan dalam Membangun Personal Branding dan Mendorong Partisipasi Politik Warga', *JPIM: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen*. Available at: <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/1774>.
- Darra Ananda, & Marizka A, R. A. (2025). Strategi Penyaluran Aspirasi Publik oleh Parlemen Perempuan Thailand: Analisis Pola Komunikasi Politik. *Communications*, 7(1), 74–103. <https://doi.org/10.21009/communications.7.1.4>
- Maritza, D. F., & Taufiqurokhman, T. (2024). Peranan Masyarakat Sipil dalam Peningkatan Akuntabilitas Birokrasi Melalui Pengawasan Publik yang Aktif. *JURNAL ILMIAH ILMU ADMINISTRASI*, 14(1), 71–84. <https://doi.org/10.33592/jiia.v14i2.4679>
- Nisa, B. S. H., Putri, S. S., & Indriyany, I. A. (2026). Triple Minority dalam Ruang Patriarki: Gendered Leadership Sherly Tjoanda sebagai Gubernur Maluku Utara. *Journal of Gender Equality and Social Inclusion (gesi)*, 5(1), 1–16. <https://doi.org/10.38156/gesi.v5i1.211>
- Hamadi, Y. (2024). 'Strategi Media Sosial Kepala Daerah dalam Membangun Citra Positif dan Implementasi Visi Misi', *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 4(2). doi: 10.51577/ijipublication.v4i2.508.
- Bariski, R.N. (2024). 'Strategi Komunikasi Politik Cicha Koeswoyo Sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD PDI-Perjuangan Dapil 7 Jakarta Pusat', *Cakrawala : Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika*, 24(2). doi: 10.31294/cakrawala.v24i2.12032.
- Suprihatin, Wulandari, A.A., Sari, R.P., Oktarina, R.A. and Amalia, D.A., 2025. Praktik Komunikasi Politik Calon Legislatif & Anggota Legislatif Perempuan di Wilayah Jawa Timur Serta Implikasinya bagi Representasi Gender. *KOMUNIKATIF: Jurnal Ilmiah Komunikasi*, [online] Available at: <https://journal.ukwms.ac.id/index.php/KOMUNIKATIF/article/view/7662>

- Syam, F., Mawarda and Ruslin, I.T., 2025. Ruang Publik Deliberatif Dan Strategi Politik Perempuan: Studi Kasus Nur Afni Kabupaten Enrekang. *Politics and Humanism*, [online] Available at: <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jph/article/view/45015>
- Wahyuni, T.R. and Septiaji, M.N., 2025. Analisis Semiotika pada Poster dalam Membangun Citra Positif di 3 (Tiga) Instansi Pemerintahan Kota Sukabumi. In: *Prosiding NARSISTIK (National Seminar of Artistic and Creative Innovation)*. Sukabumi: Universitas Nusa Putra, 15 November 2025. Available at: <http://prosiding.narsistik.nusaputra.ac.id/index.php/narsistik/article/view/58>
- Rusli, U. (2025) "PEREMPUAN DAN GREENWASHING DALAM PROMOSI AKUNTANSI KEBERLANJUTAN: ANALISIS SEMIOTIKA ROLAND BARTHES", *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 4(7), pp. 1363–1380. doi: 10.54443/sibatik.v4i7.2925.
- Soimin, S., 2025. Tanggung Jawab Negara dalam Dinamika Politik Kewargaan di Desa: Study Kasus Inisiatif Pemerintah Desa Karang Asem dalam Membangun Kepercayaan Publik. *EduLaw: Jurnal Pendidikan dan Hukum*, [online] 7(2). Available at: <https://jurnal.uibbc.ac.id/index.php/edulaw/article/view/3030>
- Purwaningsih, T., Widodo, B.E.C., Tunjung, S., Widayat, R.M., Pahlevi, M.E.T. and Amrullohi, A.A., 2024. Bibliometric Analysis of Academic Research on Money Politics in Indonesia: Challenges and Interesting Issues. *Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(1). Available at: <https://jurnal.unpad.ac.id/cosmogov/article/view/49557>
- Widodo, B.E.C. and Purwaningsih, T., 2024. Civil Societies and Issues of The Decline of Democracy in Indonesia. In: *Proceedings of the International Conference on Social and Politics (ICSP 2023)*. Atlantis Press, pp. 72-85. Available at: <https://www.atlantispress.com/proceedings/icsp-23/125997296>
- Purwaningsih, T. and Widodo, B.E.C., 2024. Leadership Capacity Building in Starting a Village-Owned Enterprises (BUMDES) Business in Bengkulu Village, Kranggan, Temanggung, Central Java. In: *Proceedings of the International Conference of Community Services: Society Empowerment Through Digital and Economic Transformation*. Atlantis Press, pp. 943-950.
- Mutiarin, D., Khaerah, N., Nyssa, A. V. I., & Nasrulhaq, N. (2024). E-Government Development: Catalysing Agile Governance Transformation in Indonesia. *Journal of Contemporary Governance and Public Policy*, 5(1), 87–110. <https://doi.org/10.46507/jcgpp.v5i1.270>
- Rahmanto, F., Purnomo, E. P., Kasiwi, A. N., & Salsabila, L. (2021). Women's Representation through Political Parties in Parliament Period of General Election 2019-2024. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, *7*(2), 100-115. <https://journal.unnes.ac.id/nju/jpi/article/view/22666>
- Riyanto, S. and Rochimah, T.H.N. (2024) 'Political Education for Women at Board of Aisyiyah (PCA) Tempel Sleman Yogyakarta', in *Proceedings of the International Conference on Communication Science (ICCS) 2024*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Riyanto, S., Rochimah, T.H.N. and Wulandari, R. (2024) 'Healthy Food as a Branding Strategy for MSMEs in Rural Areas', in *Proceedings of the International Conference on Community Service (ICCS) 2024*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Herningtyas, R., Riyanto, S. and Dinakaramani, S. (2024) 'Early Detection of Mental Health Problems in the Family: A Case Study of PRA Tirtonimrolo Selatan Bantul Yogyakarta', in *Proceedings of the International Conference on Community Service (ICCS) 2024*.

- Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Sukti, S., Warsito, T., Qodir, Z. and Jubb, H. (2022) 'Keadilan Gender: Pendidikan, Kepemimpinan dan Hak Kewarisan Islam', *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 18(2), pp. 130-137.
- Winarsih, A.S., (2025) 'The Effect of Social Assistance Programs using Cash Conditional Transfer on Environmental Resilience in Vulnerable Communities', *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1475(1), p. 012031. doi: 10.1088/1755-1315/1475/1/012031.
- Winarsih, A.S. and Kencono, D.S. (2025) 'Navigating Urbanization and Sustainability: Lessons from Jogjakarta's Green Public Space', *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1566(1), p. 012024. doi: 10.1088/1755-1315/1566/1/012024.
- Winarsih, A. S., Kencono, D. S., Yecyec, F. L. M. and Kasiwi, A. N. (2026) "Inclusive Communication in Public Service Innovation "Si Nduk KEREN" as Media for Civic Engagement in Pacitan Regency", *Jurnal Audiens*, 7(1), pp. 19–31. doi: 10.18196/jas.v7i1.742.
- Winarsih, A.S., Ratminto and Valmoria, J.J.Y. (2023) 'Smart Monitoring and Inclusivity in the Social Assistance Application', in *E3S Web of Conferences: ICENSO 2023*. Doi : <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202344001009>
- Winarsih, A.S. and Kencono, D.S. (2022) 'Penerapan Jogja Smart Service dalam Pengaplikasian Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Kota Yogyakarta', *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 5(1). doi: 10.18196/ppm.511007.
- Kelibay, I., Nashir, H., Al-Hamdi, R. and Banggu, M. (2025) 'The Transformation of the Partai Keadilan Sejahtera: Inclusivity in Indonesia's Multicultural Politics', *Mawaizh: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 16(1), pp. 110-130. doi: 10.32923/yx5c4d84.
- Anggara, R. and Pribadi, U. (2024) 'Community Participation in Village Deliberations: Examining the Dynamics of Influencing Factors', *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran Sosial Humaniora (JPPSH)*, 8(1), pp. 85-95.
- Wahyuni, H., Mutiarin, D., Pribadi, U., Ismail, N.S.A., Purnomo, E.P. and Kumorotomo, W. (2024) 'Maturity of data interoperability cross-organizations in supporting the concept of one employment data at the ministry and regional government levels', *Cogent Social Sciences*, 10(1), p. 2407936. doi: 10.1080/23311886.2024.2407936.
- Ramadhan, S.A. and Pribadi, U. (2024) 'Analisis Kepuasan Warga terhadap Layanan E-Government: Studi pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) di Kota Tangerang', *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(2), pp. 89-101.
- Suhardi, U. U. ., Pribadi, U. and Losi, Z. . (2023) "The Effects of Good Governance Principles: Accountability, Transparency, and Participation on Public Trust in Village Funds Management", *International Journal of Social Science and Business*, 7(4), pp. 1050–1060. doi: 10.23887/ijssb.v7i4.57648.
- Permatasari, A. and Walinegoro, B.G. (2023) *Tata Kelola Kolaboratif dalam Mewujudkan Smart Society sebagai Upaya Berkelanjutan Penurunan Stunting*. Sleman: The Journal Publishing.
- M. I. Muttaqin, and A. Permatasari, "Agile Government: Langkah Strategis Pemerintah Negara Indonesia Dalam Menghadapi Ancaman Resesi Global 2023," *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, vol. 8, no. 2, pp. 187-201, Sep. 2023. <https://doi.org/10.14710/jiip.v8i2.18875>
- Permatasari, A. and Walinegoro, B.G. (2023) 'Collaborative Governance in Realizing a Smart Society for Sustainable Stunting Reduction in Sleman Regency', *E3S Web of Conferences*, 440, p. 01010. doi: 10.1051/e3sconf/202344001010.
- Sulastri, S. and Permatasari, A. (2023) 'Implementasi Konsep Agile Governance dalam

Penanganan Krisis Ekonomi Pasca Pandemi COVID-19 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta', *Jurnal Transformativa*, 9(2), pp. 185-200.

Fatikha, N.T. and Permatasari, A. (2023) 'Collaborative Governance dalam Penanganan Stunting', *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 11(2), pp. 145-156.